



CATATAN AKHIR TAHUN 2017 & RESOLUSI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2018

TAHUN 2017: BANTEN DARURAT AGRARIA,
BANTEN DARURAT KEMISKINAN



DEWAN PENGURUS WILAYAH
SERIKAT PETANI INDONESIA PROVINSI BANTEN
DAN DAMAR LEUIT
TAHUN 2018

PENGANTAR

Pada tanggal 4 Oktober 2017 Provinsi Banten mensyukuri usia yang ketujuh belas tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Banten resmi berpisah dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi dengan ibu kota Serang ini memiliki potensi sumber-sumber agraria yang besar—termasuk pertanian. Bahkan secara filosofis penamaan Serang sendiri merupakan pemaknaan dari bahasa sunda yang berarti 'sawah'.

Dari segi historis, kemutakhiran teknologi perairan (irigasi) sebagai penopang pertanian Kesultanan Banten saat masa Sultan Ageng Tirtayasa sudah tersohor ke seluruh dunia. Begitu pun dengan alasan Belanda pertama kali mendatangi Nusantara—Hindia saat itu—yakni ke Banten untuk berdagang rempah-rempah (hasil pertanian). Artinya, baik secara historis maupun filosofis, pertanian menjadi jantung dan tulang punggung Banten. Dilatarbelakangi oleh kejayaan Kesultanan Banten dan peradaban yang tinggi dalam mengelola pertanian rakyat, Provinsi Banten sudah sepatutnya menjadi salah satu sentra pertanian nasional.

Tahun 2017 merupakan tahun yang menentukan untuk menilai kinerja pemerintah Joko Widodo dalam mengimplementasikan Nawa Cita (9 Program Prioritas) dibidang agraria, pedesaan, pertanian, dan pangan. Pada tahun 2017 juga bisa disebut sebagai tahun penantian implementasi janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur baru Provinsi Banten. Karena tahun 2018 dan 2019 akan menjadi tahun politik.

Provinsi Banten mulai menapaki langkah pemerintahan bersama pemimpin baru. Pertengahan bulan Mei lalu Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumi resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sebagai awal pijakan, WH-Andika telah menyiapkan tiga program prioritas untuk membangun Banten, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

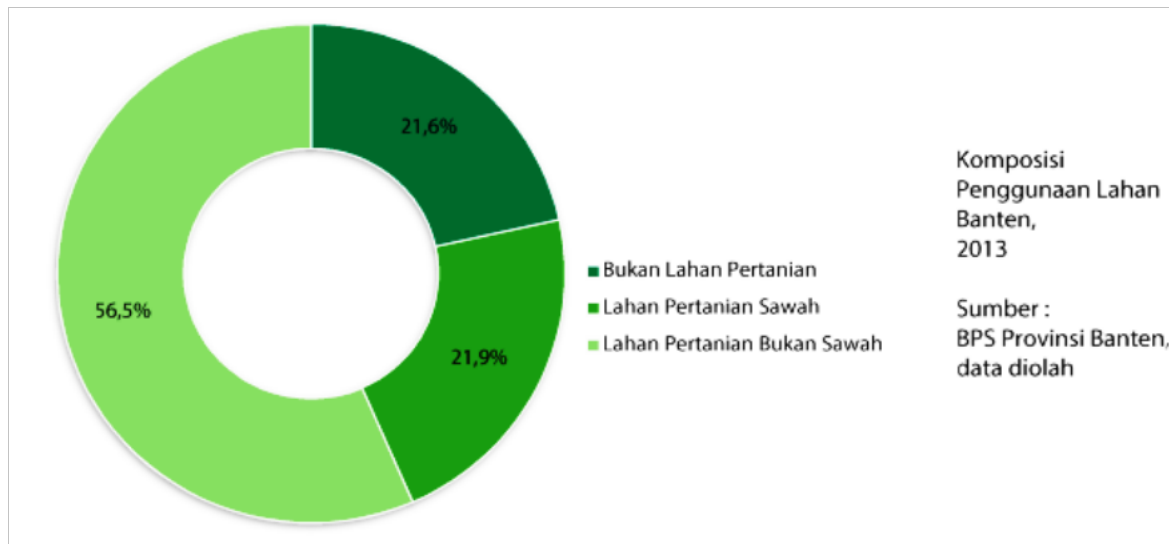
Dalam menyambut pemimpin baru sudah tentu rakyat terkhusus petani Banten banyak menggantungkan harapan. Setelah hampir tujuh belas tahun berpisah dari Jawa Barat, belum ada perubahan yang signifikan dirasakan. Kenyataan ini dapat ditinjau dari belum meningkatnya status daerah tertinggal yang disematkan kepada Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang notabene daerah sentra pertanian selain Kabupaten Serang di Provinsi Banten.

Ditinjau dari visi, misi dan program, WH-Andika menempatkan pertanian sebagai permasalahan ke-8 dari 21 permasalahan umum di Banten. Masalah pertanian berada tepat setelah penjabaran ketimpangan pendapatan antar penduduk atau kelompok masyarakat pada urutan ke-7. Hal ini menunjukkan bahwa selain masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, WH-Andika juga akan fokus membenahi masalah pertanian di Banten. Terlebih masalah pertanian yang dimaksud sangat erat berkaitan dengan tingkat ketimpangan perekonomian masyarakat.

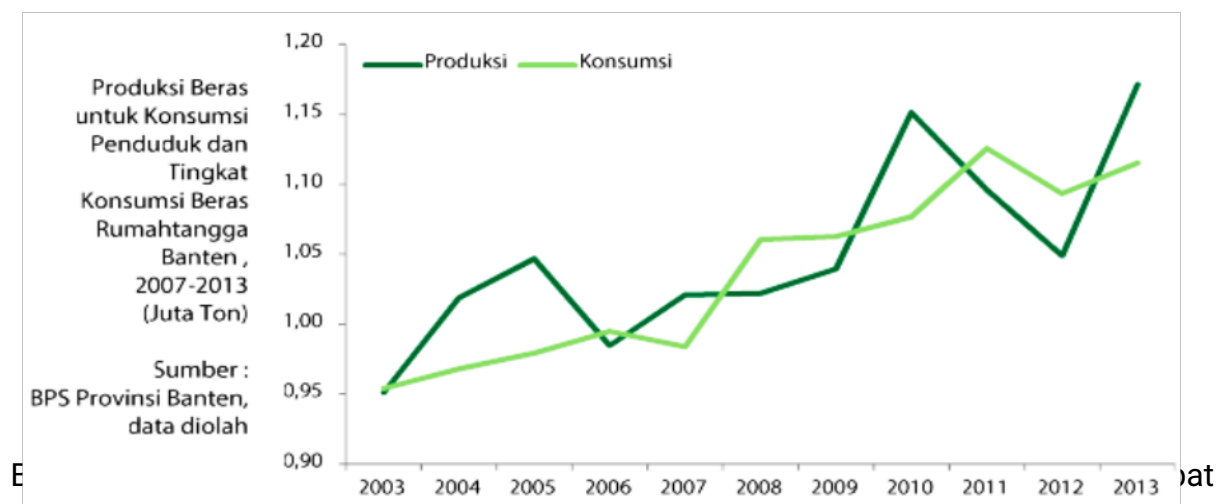
Sehubungan dengan itu, kami Dewan Pengurus Serikat Petani Indonesia (DPW-SPI) Provinsi Banten sebagai organisasi massa perjuangan petani dan Damar Leuit sebagai lembaga masyarakat yang fokus terhadap permasalahan agraria, pedesaan, pertanian dan pangan. Berikut catatan DPW-SPI Provisi Banten dan Damar Leuit sepanjang tahun 2017.

PERTANIAN DAN PERDESAAN

Sensus Pertanian Tahun 2013 mengungkapkan bahwa berbagai jenis usaha pertanian ditemukan disemua wilayah Provinsi Banten. Proporsi luas wilayah Provinsi Banten sendiri yang telah digunakan untuk usaha pertanian pada tahun 2013 mencapai 78,4 persen dari luas daratan. Lahan untuk usaha pertanian terdiri dari lahan pertanian sawah 21,9 persen dan lahan pertanian bukan sawah 56,5 persen¹.



Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan penduduk di Banten ternyata lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi pangan, dalam hal ini yaitu beras. Jumlah penduduk Banten pada tahun 2013 telah mencapai 11,5 juta jiwa, bertambah sekitar 2,7 juta jiwa dibandingkan tahun 2003 sebanyak 8,8 juta jiwa. Hal itu mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, penduduk Banten rata-rata tumbuh sebesar 2,7 persen per tahun. Sementara produksi beras di Provinsi Banten untuk konsumsi penduduk pada periode yang sama secara rata-rata hanya tumbuh sebesar 2,1 persen per tahun, dari 0,95 juta ton pada tahun 2003 menjadi 1,2 juta ton pada tahun 2013².



¹ BPS Provinsi Banten, Potensi Pertanian Banten 2014 (Analisis Hasil Sensus Pertanian 2013)

² BPS Provinsi Banten, Potensi Pertanian Banten 2014 (Analisis Hasil Sensus Pertanian 2013)

menyebabkan kelangkaan pangan, yang pada akhirnya akan memicu krisis kemanusiaan, kelaparan, perang, kerusuhan, dan kematian. Ditengah kondisi itu, pada tahun 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menyatakan laju penyusutan luas baku lahan pertanian di Banten dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 0,14% per tahun. Dalam kata lain luas baku lahan pertanian menghilang sekitar 273 ha setiap tahun atau sekitar 5 ha per minggu.

Luas baku lahan sawah yang tersebar di empat Kabupaten dan empat Kota di Banten tersisa hanya sebesar 194.716 ha saja. Adapun rincian sisa luas baku lahan sawah di empat Kabupaten antara lain, Pandeglang tersisa 54.080 ha, Lebak 45.843 ha, Tangerang 38.644 ha dan Serang 45.024 ha. Sementara luas baku lahan sawah di kawasan perkotaan antara lain Tangerang tersisa 690 ha, Cilegon 1.746 ha, Serang 8.476 ha dan Tangerang Selatan hanya tersisa 213 ha³. Sepatutnya penyusutan tanah pertanian bisa dikendalikan melalui instrumen Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam meningkatkan produksi pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten sepanjang tahun 2017 menggenjot produksi pangan strategis seperti padi, jagung dan kedelai. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi padi di Provinsi Banten masih cenderung stagnan dikisaran 2 juta ton. Sementara itu kedelai mengalami penurunan yang signifikan yakni sekitar 6 ribu ton, dari tahun 2013 sebesar 10.326 ton menjadi 4.102 ton pada tahun 2017. Kenaikan produksi terjadi pada pertanaman jagung mencapai lebih dari 700 persen, dari 12.038 ton menjadi 93.002 ton⁴.

PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI PROVINSI BANTEN TAHUN 2013-2017

TAHUN	PADI	JAGUNG	KEDELAI
2013	2.083.608	12.038	10.326
2014	2.045.883	10.514	6.384
2015	2.188.996	11.870	7.291
2016	2.358.202	19.882	4.020
2017*	2.405.502	93.002	4.102

Sumber: BPS, diolah SPI Banten dan Damar Leuit

*Angka Ramalan II Kementerian Pertanian RI

Kenaikan produksi juga diikuti dengan kenaikan harga. Pada bulan Januari 2017 rata-rata harga gabah untuk Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp. 5.050 per kg,- dan Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp. 4.300,- per kg⁵. Sementara pada bulan Desember 2017 rata-rata harga GKG sebesar Rp.5.216 per kg dan GKP Rp.5.114,- per kg,- dan kualitas rendah Rp.4.578,- per kg⁶. Berdasarkan harga pada tahun 2017

³ Kementerian Pertanian RI, Bulan Agustus 2014

⁴ BPS tahun 2017, produksi pangan Indonesia 2013-2017

⁵ BPS Prov. Banten, Perkembangan NTP dan Harga Gabah, No.07/02/36/ Th.XI, 1 Februari 2017

⁶ BPS Prov. Banten, Perkembangan NTP dan Harga Gabah, No.02/01/36 Th.XII, 2 Januari 2018

tersebut, membuktikan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sudah tidak relevan lagi diterapkan di Provinsi Banten. Karena dalam Inpres diatur harga GKP ditetapkan hanya sebesar Rp. 3.700 per kg dan GKG sebesar 4.600 per kg.

Sebagai penunjang peningkatan produksi, pemerintah mendistribusikan pupuk subsidi di Provinsi Banten. Jenis pupuk yang disubsidi tersebut antara lain Urea, SP-36, ZA, NPK, dan organik. Walaupun alokasi subsidi pupuk tahun 2017 sebesar 118.847 ton, namun per 18 Desember 2017 baru 108.515 ton⁷ yang disalurkan. Hal ini lah yang menyebabkan di beberapa lokasi terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.

Selain pupuk, banyak juga ditemukan subsidi benih belum tepat sasaran dan berkualitas rendah. Padahal terhitung tahun 2017, Kartu Tani diluncurkan. Pemerintah mencanangkan sebanyak 291.700 petani di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten akan memperoleh Kartu Tani. Kartu Tani digunakan sebagai data untuk pemerintah menyalurkan prasarana dan sarana pertanian. Jumlah petani di Provinsi Banten yang akan mendapatkan kartu tani berasal dari Kabupaten Lebak sebanyak 75.780 petani, Kabupaten Pandeglang 91.846 petani, Kabupaten Serang 54.527 petani, Kabupaten Tangerang 55.333 petani, Kota Cilegon 4.240 petani, Kota Serang 7.565 petani, Kota Tangerang 1.283 petani dan Kota Tangerang Selatan 1.126 petani⁸.

Selain pupuk dan benih bersubsidi, yang menjadi kendala produksi pangan di Provinsi Banten yakni gagal panen. Pada bulan Juli 2017, sawah seluas 8 ribu hektar terserang hama wereng. Serangan hama ini mengakibatkan 287,7 hektar sawah gagal panen. Serangan paling parah terjadi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang sebagai sentra produksi padi Provinsi Banten. Sangat disayangkan solusi dari pemerintah untuk menanggulangi ini melalui asuransi pertanian.

Petani diwajibkan membayar Rp. 180.000 per ha setiap musim tanam, namun saat ini karena masih disubsidi pemerintah sebesar Rp. 144.000, petani hanya membayar Rp. 36.000. Padahal berdasarkan Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tentang ganti kerugian gagal panen, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan ganti kerugian gagal panen secara langsung kepada petani.

Permasalahan diatas menyebabkan berbagai masalah diperdesaan seperti tingginya inflasi diperdesaan. Pada bulan Desember 2017 di empat Kabupaten di Provinsi Banten terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,64 persen. Menurut BPS Desember 2017, Pemicu tertinggi terjadinya inflasi ini adalah kelompok bahan makanan yakni sebesar 1,42 persen. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab tingginya kemiskinan diperdesaan.

⁷ Kementerian Pertanian RI, Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2017

⁸ Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Agustus 2017

KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah utama di perdesaan, para penduduk desa yang secara umum memproduksi pangan justru menjadi pihak yang paling banyak menderita kemiskinan. Hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 26,58 juta jiwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia sebesar 16,31 juta jiwa atau 61,3 persen berada diperdeasaan⁹. Menurut Kementerian Pertanian RI pada tahun 2013 yang lalu, setidaknya terdapat 26,14 juta rumah tangga petani diperdeasaan, dimana sekitar 17,73 juta rumah tangga diantaranya adalah petani tanaman pangan¹⁰ yang memproduksi pangan bagi 250 juta penduduk Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama bertambah sebesar 24,79 ribu orang dari 675,04 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 699,83 ribu orang pada bulan September 2017¹¹. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode Maret-September 2017, Garis Kemiskinan di Provinsi Banten naik sebesar 5,23 persen, yaitu dari Rp 386.753,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 406.988,- per kapita per bulan pada September 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Jika mengacu Susenas, peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Porsi beras dan rokok kretek filter menjadi komoditi yang memberi pengaruh besar pada kenaikan Garis Kemiskinan baik dikota maupun diperdeasaan pada September 2017.

Kemiskinan ini sebetulnya sudah lama dipicu oleh salah satunya penyusutan luas baku lahan pertanian di Banten dalam lima tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada tahun 2013 besarnya mencapai 0,14% per tahun¹² dengan kata lain telah menghilang sekitar 273 ha tiap tahun atau sekitar 5 ha per minggu.

KESEJAHTERAAN PETANI

Kesejahteraan petani memang bisa dikaji dari berbagai sisi. Namun analisis yang bisa dijadikan indikator dapat kita tinjau melalui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan. NTP merupakan perbandingan antara hasil yang diterima petani dari kegiatan usaha tani dengan biaya yang dikeluarkan petani untuk kebutuhan sehari-hari—termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya usaha tani. Jika angka NTP diatas 100 maka dapat dikatakan petani memperoleh pendapatan lebih dari kagitan usaha tani, namun sebaliknya jika NTP dibawah 100 maka petani mengalami kerugian.

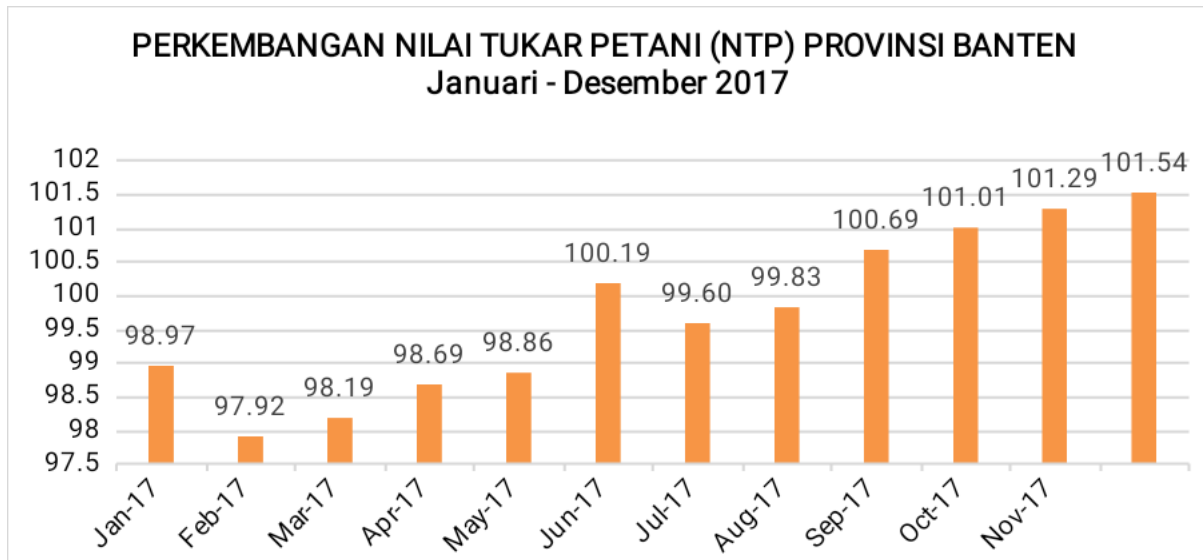
⁹ Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th. XXI, 2 Januari 2018

¹⁰ Sensus Pertanian Nasional Tahun 2013

¹¹ Profil Kemiskinan Banten September 2017 No. 05/01/36.Th XII, 2 Januari 2018

¹² BPS Provinsi Banten tahun 2013

NTP Provinsi Banten mengalami penurunan yang drastis dari 106,57 pada bulan Februari 2016 menjadi 100,69 pada bulan Agustus 2017. Bahkan sejak Januari 2017 sampai dengan Agustus 2017-kecuali Juni 2017-NTP Provinsi Banten berada dibawah angka 100. NTP kembali perlahan mulai naik walau tidak signifikan mulai bulan September 2017 dari 100,69 menjadi 101,54 pada Desember 2017. Situasi NTP tersebut membuktikan konsentrasi kebijakan pemerintah Provinsi Banten belum berorientasi pada kesejahteraan petani.



Sumber: BPS, diolah SPI Banten dan Damar Leuit

Padahal sebagai provinsi yang masuk kedalam sepuluh besar penyumbang produksi beras nasional, sepatutnya sentra pembangunan Banten dikonsentrasikan untuk pertanian di perdesaan. Menurut data BPS Banten pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian (termasuk peternakan) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten sangat lah kecil yakni hanya sebesar 5,42 persen. Karena itu, kemiskinan diperdesaan Banten masih sangat tinggi dan pengangguran juga semakin meningkat.

Secara relatif pengangguran menunjukkan peningkatan dari 8,92 persen pada Agustus 2016 menjadi 9,28 persen pada bulan Agustus 2017¹³. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat bahkan lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Pada Agustus 2017, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat kedua tertinggi nasional setelah Provinsi Maluku.

Tingginya pengangguran langsung berdampak pada penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja disektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan. Selama medio Februari 2017 – Agustus 2017, penduduk yang bekerja di disektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan mengalami penurunan, dari 809 ribuan orang menjadi 676 ribuan orang. Jika dipersentasekan angka ini hanya 13-14 persen dari total angkatan kerja di Provinsi Banten sebanyak sekitar 5 juta sampai dengan 5,5 juta orang pada tahun 2017.

¹³ Ketenagakerjaan Banten No. 66/11/36.Th XI, 6 November 2017

Ditengah situasi demikian, BPS Banten melaporkan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) bahwa Indeks Kebahagiaan Banten pada tahun 2017 sebesar 69,83 dari skala 0-100¹⁴. Banten menempati urutan keenam provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan terendah secara nasional diatas Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Jawa Barat. Bahkan indeks kebahagiaan Banten masih lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kebahagiaan Indonesia sebesar 70,69. Hal itu sangat kontras jika ditinjau secara geografis Provinsi Banten yang langsung berbatasan dengan Jakarta sebagai pusat pemerintah RI.

KONFLIK AGRARIA

Berdasarkan mandat Pasal 33 UUD 1945, sumber-sumber agraria atau kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu sebagai pelaksana konstitusi, pada tanggal 24 September 1960 disahkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu sumber agraria yang harus didistribusikan kepada rakyat adalah tanah. Tanah adalah sumber kehidupan, terutama bagi petani.

Namun perebutan tanah masih kerap terjadi, terutama antara petani dengan pemerintah dan swasta. Padahal pangkal dari segala kemiskinan adalah tanah. Sementara sampai tahun 2017 ini, ketimpangan penguasaan kepemilikan dan pemanfaatan tanah masih timpang. Hal ini lah yang menyebabkan konflik agraria yang dialami petani khususnya di Provinsi Banten. Berikut konflik-konflik agraria yang perlu disoroti dan harus menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan sepanjang tahun 2017 di Provinsi Banten:

- 1. Konflik agraria petani Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang dengan Perum Perhutani.** Petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) sejak tahun 1981 terlibat konflik dengan Perhutani berada di area luas lahan seluas 3.500 ha. Konflik yang berkepanjangan berdampak pada kehidupan petani secara rata-rata. Bahkan para petani dikriminalisasi dan diintimidasi.
- 2. Konflik agraria petani Kec. Cigemblong dan Kec. Cijaku, Kab. Lebak dengan PT. Pertiwi Lestari.** Petani anggota SPI yang berkonflik dengan PT. Pertiwi Lestari terdapat di Desa Cigemblong seluas 350 ha (Seluruhnya dikuasai perusahaan), Desa Cikaratuan seluas 900 ha (izin berakhir tahun 2007), Desa Cikaret 515 ha, Desa Cikate 933 ha, Desa Cibungur 212 ha, Desa Mugijaya 78 ha. Kemudian di Kecamatan Cijaku yakni di Desa Peucangpari 1.200 ha dan Desa Cibeureum seluas 155 ha. Total Keseluruhan Hak Pakai perusahaan di dua Kecamatan mencapai 3.200 ha.
- 3. Konflik agraria petani di Kecamatan Binuang Kab. Serang dengan TNI AU.** Konflik agraria yang terjadi antara petani anggota SPI di Kecamatan Binuang Kab. Serang dengan TNI AU berlangsung ketika pada tahun 1984 dibangun landasan udara dan mess AURI di tanah milik masyarakat. Total luas tanah yaitu 712 ha terdapat di empat desa Kecamatan Binuang. Selain terbatasnya sumber-sumber agraria yang diakses oleh petani, tanaman yang ditanami petani pun kerap menjadi sasaran pengrusakan ketika TNI AU berlatih.

¹⁴ Indeks Kebahagiaan Banten Tahun 2017, No. 49/08/36/Th. XI, 15 Agustus 2017

4. **Konflik agraria pembangunan Waduk Karian Kab. Lebak.** Pembebasan lahan waduk karian mendapat penolakan dari warga termasuk petani di Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kab. Lebak. Sebab disekitar areal pembangunan yang luasnya 101 ha, didalamnya terdapat 78 bidang tanah pertanian. Proses penyelesaian menemui jalan buntu karena dengan pembangunan waduk, secara otomatis tanah pertanian akan tergusur dan mengancam keberlangsungan hidup petani. Solusi harus segera ditempuh agar sumber-sumber agraria dapat kembali digunakan oleh petani.
5. **Konflik agraria petani dengan PT. Tirta Fresindo Jaya.** PT. Tirta Fresindo Jaya merupakan anak perusahaan PT. Mayora Group. Petani dari Kecamatan Cadasari Kab. Pandeglang dan Kecamatan Baros Kab. Serang sejak tahun 2014 warga melancarkan protes mengusir PT. Tirta Fresindo Jaya yang akan membangun pabrik air minum kemasan Le Minerale. Lokasi itu adalah sumber mata air yang menopang kehidupan warga. Berawal dari penolakan warga dengan cara pembakaran alat berat (backhoe) serta perusakan sarana dan prasarana pabrik. Protes memuncak pada awal Februari 2017 dan berujung kriminalisasi. Dengan penangkapan 6 warga dikriminalisasi atas tuduhan-tuduhan penggerak dan pererusakan, bahkan tiga diantaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka.
6. **Konflik agraria warga Pulau Sangiang dengan PT. Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden).** Konflik agraria didasari dengan adanya perampasan tanah warga pulau sangiang terhadap PT. Pondok Kalimaya Putih (grend garden). Warga Sangiang menuntut agar BPN Serang membuka data informasi status kepemilikan tanah warga dan perusahaan, mendesak bupati Serang segera menyelesaikan persoalan sengketa pulau, meminta Polda Banten untuk menghentikan proses pemeriksaan enam warga Sangiang atas dugaan penyerobotan lahan milik PT. PKP dan meminta Ombudsman RI, Komnas HAM RI agar turun tangan pada proses administrasi dan perlindungan hukum dari intimidasi.
7. **Konflik agraria petani Cikeusik dan Cibaliung dengan PT. Globalindo Agro Lestari (PT. GAL).** PT. Globalindo Agro Lestari (GAL) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, dimana salah satu perkebunannya berada di wilayah Cikeusik dan Cibaling serta banyak menguasai lahan-lahan milik masyarakat serta membeli lahan-lahan milik masyarakat dengan murah.

PENUTUP

Berdasarkan persoalan-persoalan agraria, perdesaan, pertanian dan pangan di Provinsi Banten yang meliputi: *penyusutan luas tanah pertanian, fluktuasi produksi pangan, subsidi pupuk dan benih belum tepat sasaran, gagal panen, pembangunan perdesaan, peningkatan kemiskinan, rendahnya kesejahteraan petani, dan konflik agraria.* Kami **DPW SPI BANTEN** dan **DAMAR LEUIT** mendesak **Pemerintah Provinsi Banten** untuk:

1. Melaksanakan reforma agraria di Provinsi Banten dengan meredistribusikan tanah kepada petani;
2. Menyelesaikan konflik-konflik agraria di Banten dengan menghentikan kriminalisasi petani dan pejuang agraria, serta membentuk lembaga pelaksana reforma agraria di Provinsi Banten;

3. Meninjau ulang seluruh konsesi pertanahan dan kawasan kehutanan di Provinsi Banten;
4. Menghentikan perpanjangan izin konsesi pertanahan dan kawasan kehutanan di Provinsi Banten;
5. Menghempang alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran melalui penerapan menyeluruh Perda 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terkhusus dalam tataran praktek, Gubernur harus mendesak Bupati dan Wali Kota mengoperasionalkan Perda Provinsi tersebut kedalam Perda sejenis di tingkat kabupaten dan kota;
6. Meningkatkan produksi pangan melalui pertanian agroekologis, sebagai suatu sistem pertanian yang menyeluruh dan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat pertanian. Sistem pertanian ini tidak menggunakan benih produksi korporasi, pupuk dan obat-obatan kimia, tetapi menggunakan benih petani, pupuk dan obat-obatan alami, pengetahuan tradisional yang ada di sekitar tanah pertanian dan adat petani. Dengan agroekologi keluarga petani akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan sosial, alam menjadi lestari, lingkungan terjaga dan juga menghentikan ketergantungan petani terhadap produk korporasi;
7. Mengalihkan subsidi benih dan pupuk langsung kepada petani melalui 1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik di Provinsi Banten;
8. Menjalankan mandat UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkhusus perihal ganti kerugian kepada petani secara langsung;
9. Membangun desa melalui peningkatan ekonomi petani dengan koperasi dan menjalankan reforma agraria berbasis perdesaan untuk mengendalikan inflasi di perdesaan dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Banten.
10. Meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan PDRB dari sektor pertanian. Pemerintah daerah (pemda) harus menetapkan penjaminan harga hasil panen petani. Sehingga petani tidak lagi dipaksa untuk menerima fluktuasi harga hasil dari mekanisme pasar.

Menakar kondisi catatan tersebut, DPW SPI Banten menyatakan dengan tegas bahwa pada tahun 2017 adalah **Banten Darurat Agraria, Banten Darurat Kemiskinan.**

Serang, Januari 2018

DPW SPI BANTEN & DAMAR LEUIT